BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada masa Nabi Muhammad berpusat pada masjid, peran masjid pada watku itu merupakan sentral dari segala urusan agama Islam, suatu hadist diriwayatkan :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَاَ أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اْلأَصْبَهَانِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ جَائَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَناَ مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ فَقَالَ اِجْتَمِعْنَ فِى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَـاهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ إِمْرَأَةٌ تَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ اثْنَيْنِ وَ اَثْنَيْنِ وَ اْثنَيْنِ — رواه البخاري

Artinya: Dari Musaddad, telah berkata Abu ‘Awanah dari Abdurrahman ibn Al Ashbahaniy dari Abu Shalih Dzakwan dari Abu Sa’id, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah saw. dan ia berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang laki-laki pergi (mempelajari) hadismu, maka jadikanlah (luangkanlah) untuk kami dari dirimu (waktumu) sehari (dimana) kami bisa menjumpaimu pada hari itu dan engkau mengajarkan kepada kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Rasul menjawab, “Datanglah pada hari ini dan ini di tempat ini dan ini.” Maka mereka berkumpul dan Rasulullah saw. mendatangi mereka lalu mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, “Tidak ada perempuan di antara kalian yang mendidik (mengajar) tiga orang anaknya kecuali ia ter-*hijab* (terhalang) dari api neraka. Seorang perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di anatar mereka bertanya, “Ya Rasulullah, atau (bagaimana kalau) dua orang?” kemudian dia mengulanginya sampai dua kali. Beliau menjawab, “Dua orang, dua orang dan dua orang.” (HR. Bukhari).

Pada masa Nabi Muhammad, pusat pendidikan adalah di masjid, kemudian pada masa-masa selanjutnya –seiring dengan perkembangan zaman- tempat pendidikan Islam di Perpustakaan, Kuttab, dan madrasah.

Dalam realitas pendidikan Islam Indonesia, saat membicarakan tentang pendidikan Islam selain pesantren, maka yang terbayang dalam benak kita adalah madrasah. Institusi pendidikan ini lahir pada permulaan abad 20 yang dianggap sebagai awal periode pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.[1]

Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu adalah pesantren. Dengan demikian pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Karena itu membicarakan madrasah di Indonesia dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren cikal-bakalnya. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari.[2]

---

[1] Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Tranfirmatif*, (Yogyakarya: LKIS, 2009), 199.
[2] Ibid, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan madrasah di Indonesia pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang mabawa gagasan pembaharuan pendidikan,[3] setelah mereka kembali menutut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikanyapun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-nak mereka dengan biaya ringan.[4]

Historisitas madrasah sejak mulai dikenal dikalangan masyarakat muslim Indonesia telah menjadikanya lembaga pendidikan Islam ini tumbuh dengan karakteristik yang membedakan dirinya dengan sekolahan pada umumnya. Motivasi utama pembentukan madrasah lebih diwarnai oleh kebutuhan memenuhi kewajiban menuntut ilmu – khususnya ilmu agama, dari pada menyiapkan tenaga terampil pada bidang-bidang kerja tertentu. Secara spesifik madarasah dibangun oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagamaan masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagamaan masyarakat terhadap pentingnya pemahaman sekaligus pelestarian terhadap ajaran agama (*tafaqquh fid-din*).

Demikianlah yang dipahami sebagai jati diri madrasah. Hal ini tidak semata-mata mencakup jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi mencakup juga mencakup jati diri Islam dan jati diri umat Islam. Dengan didorong oleh semangat dan cita-cita yang luhur mengejawantakan nilai-nilai Islam, bangunan personifikasi madarasah tidaklah sederhana, sebab menjadikan menjadikan nilai Islam sebagai sistem pendidikan masyarakat muslim berupaya

---

[3] Seperti madrasah yang didirikan oleh Syech Amrullah Ahmad (1907) di Padang, KH Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH Mas Mansur (1914) di Surabaya dan KH Hasyim Asy'ari (1921) di Jombang.

[4] Marwan salahuddin, *Reposisi dan Eksisitensi Madrsah Salafiyah di Era Global*, Cendikia Vol 11 No 2 Desember 2013, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi religiuitasnya sehingga Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan.[5]

Sejarah perkembangan madrasah tidak bisa lepas dari pesantren, di dunia pesantren terkenal dengan adanya elemen-elemen pokok dari suatu pesantren, yaitu : pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Kelima macam elemen ini merupakan pliar-pilar dari pesantren. Dalam sistem madrasah tidak harus ada pondok, masjid dan pengajian kitab-kitab klasik, elemen-elemen yang diutamakan di madrasah adanya lokal tempat belajar, guru, siswa dan rencana pembelajaran.[6]

Sebagian sarjana pendidikan berasumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya menambahkan muatan dan corak keislaman terhadap tradisi pendidikan yang sudah ada, terutama bermula dari agama Hindu, "masuknya agama Islam tidak mengubah hakikat pengajaran agama yang formil, yang berubah sejak pengembangan agama Islam ialah: isi agama yang dipelajari, bahwa yang menjadi wahana bagi pelajaran agama itu, serta latar belakang pelajar-pelajar. Ditambah lagi dalam zaman pengembangan agama Islam tidak mengalami perubahan, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah yang berkenaan dengan struktur organisasi pendidikan keagamaan itu, mengikuti asusmsi ini orang tentunya akan mudah cenderung kepada anggapan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia merupakan sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi persekolahan yang

---

[5] Nuruddin, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Peneliti*, Dialog Vol. 37, No 1 juni 2014. 69.
[6] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mengingat struktur dan mekanismenya yang hampir sama, sekilas dapat dilihat bahwa madrasah adalah bentuk lain dari sekolah-sekolah yang hanya diberi muatan dan corak keislaman.

Asumsi seperti itu agaknya tidak sepenuhnya benar, meskipun dalam ukuran tertentu tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan madrasah itu merupakan respon pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam kerangka politik etisnya. Latar belakang lainya yang layak dipertimbangkan adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 20 ini merupakan bagian dari pembaharuan Islam di Indonesia, yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan yang berada di Timur Tengah.[7]

Faktor penting bagi perubahan Islam di Indonesia pada permulaan abad 20 ini dapat dibagi menjadi 4 hal yaitu: 1). Semenjak tahun 1990 di beberapa tempat muncul keinginan untuk kembali kepada Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecendrungan ini menolak taqlid. Dorongan ini muncul dari golongan Muhammad Abduh dan murid-muridnya dari Mesir unsur ini juga mendorong umat Islam Indonesia untuk kembali kepada Qur'an dan Sunnah . 2). Sifat perlawanan nasionalis terhadap penguasa kolonial Belanda. Dalam hal ini meskipun Belanda juga panik terhadap Pan-Islaisme, namun mereka yang menolak Belanda hampir tidak mau menerima Pan-Islamisme, penentangan terhadap kolonialisme selalu bersifat nasionalisme. 3). Usaha yang kuat bagi dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya dibidang sosial ekonomi, baik demi kepentingan

[7] Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembanganya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak. 4). Dorongan dari pembaharu pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi pada permulaan abad 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode mapun isinya.[8]

Dipacu oleh semangat Pan Islamisme dan gerakan pembaharuan Islam di Timur tengah hal ini membangkitkan gerakan pembaharu Islam Indonesia yang pada giliranya gelarakan tersebut juga memicu tumbuhnya gerakan pembaharuan di bidang pendidikan Islam. Di sumatera muncul antara lain Madrasah Adabiyah yang didirikan di Padang oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1908. Pada tahun 1915 madrasah ini berubah menjadi HIS Adabiyah. Sementara itu pada tahun 1910 M. Taib Umar juga mendirikan Madrasah Schoel di Batusangkar, sedangkan H. Umar Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madrasah School.

Sementara itu pondok pesantren tidak ketinggalan untuk turut serta mendirikan lembaga serupa. Syaikh Adbul Karim Amrullah mendirikan Madrasah Tawalib di Padang Panjang di Jambi, di Aceh didirikan Madrasah yang pertama pada tahun 1903 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureuh. Madrasah Al-Muslim oleh tengku Abdur Rahman Munasah Mencap, madrasah Sarul Huda dan banyak madrasah-madrasah yang di Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lainya.

Diantara para ulama yang berjasa dalam perkembangan madrasah di Indonesia antara lain: Syeikh Amrullah Ahmad (1907) di padang, K.H. Ahmad

[8] Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 26-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahlan (1912) di Yogyakarta, K.H. Wahab Hasbullah bersama K.H. Mas Mansyur (1914) di Surabaya. Rangkayoso Rahman al-Yunusi (1915) di Padang Panjang, K.H. Hasyim Asyari (1919) mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang.[9]

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa awal abad ke 20 adalah masa pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia dengan nama dan tingkatan yang bervariasi. Namun dapat dikatakan bahwa madrasah-madrasah tersebut pada masa pertumbuhanya hanya bersifat diniyah semat-semata. Baru pada sekitar tahun 1930 baru terjadi pembaharuan dalam dunia madrasah yaitu dengan masuknya pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah tersebut.

Seperti halnya pesantren, madrasah merupakan lembaga mandiri yang sangat tergantung pada kemampuan pendirinya. Ada sementara madrasah yang hanya menyelenggarakan satu kelas permulaan, adapula yang mampu mendirikan pendidikan tingkat awal sampai dengan tingkat tinggi, disamping itu terdapat pula variasi dalam rencana pembelajaranya, baik dalam tingkatan maupun materinya[10]

Berdasarkan ungkapan diatas dapat dipahami bahwa sistem madrasah mirip dengan sistem pendidikan sekolah umum yang berada di Indonesia. Para siswa tidak mesti tinggal di pemondokan madrasah, siswa cukup datang ke madrasah pada jam-jam berlanngsung pada pagi hari dan sore hari, dengan demikian tidak mesti adanya masjid dalam lingkungan madrasah, kalau para siswa bermaksud melaksanakan salat mereka melaksanakanya di musala.[11]

---

[9] Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 18-19.

[10] Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), 71

[11] Hal senada juga diungkapkan oleh Malik Fadjar, Madrasah dewasa ini berdiri secara berdampingan dengan sistem persekolahan yang lain. Sebagian besar organisasi madrasah disusun serupa dengan organisasi persekolahan. Secara bertingkat ada madrsah ibtidaiyah atau MI, ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari sejarah madarah dalam pendidikan Islam Indonesia dan posisnya dalam Sistem Pendidikan Nasional, secara tidak langsung memberikan inspirasi dan daya tarik bagi penulis untuk meneliti tentang tema ini.

Penulis beranggapan bahwa kehadiran madrasah dalam sistem pendidikan Nasional secara tidak langsung memberikan warnah dan juga memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembangnya pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis memberikan judul dalam tesis ini "Integrasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional (Analisis Kebijakan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Kini eksistensi madrasah sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia telah sejajar dengan sekolah umum baik negeri maupun swasta, kedudukan yang bersifat legal formal – sebagai wujud kebijakan pemerintah, satu sisi dapat mendongkrak status madrasah di masyarakat sebagai lembaga pendidikan kelas dua (*second class*) meningkat dan berdiri sejajar dengan pendidikan umum, akan tetapi madrasah masih dihadapkan pada pilihan sulit untuk menentukan masa depanya sebagai pendidikan Islam. Yaitu, apakah madrasah bertahan dalam pola lama sebagai lembaga pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan agama Islam atau mengubah dirinya menjadi sekolah umum dengan mengonsentrasikan pendidikan pada pengetahuan umum (70%) dan sedikit pengetahuan agama (30%).[12] .

---

madrsah tsanawiyah atau MTs, dan ada madrsah aliyah atau MA. Madrsah-madrsah itu setingkat dan sederajat dengan SD, SMP dan SMA. Komposisi mata pelajaran di madrsah mencakup komponen-komponen mata pelajaran agama, seperti Al-Qur'an, hadist, fiqh, aqidah akhlaq, sejarah kebudayaan Islam serta bahasa Arab. (Lihat Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), 28.

[12] Ninik Masrurah dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, (Jogjakarta: Ar Rozz Media, 2011), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan penelitian dalam tesis ini mulai dari sejarah perkembangan madrasah dalam pendidikan Islam, kemudian memaparkan sejarah madrasah dalam Pendidikan Islam Indonesia, latar belakang yang mendasari terbentuknya madrasah di Indonesia dan bagaimana dampak sosial yang terjadi setelah didirikannya madrasah.

Selain membahas tentang sejarah tesis ini juga menganalisis tentang kebijakan-kebijakan sistem pendidikan nasional tentang posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan atau orde lama, orde baru dan pasca reformasi.

Fokus pembahasan dalam tesisi ini tentang kurikulum madrasah mulai pada sebelum kemerdekaan sampai pasca reformasi.

Integrasi : Penyatuan hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat .[13]

Madrasah : Sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam)[14], Madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat untuk belajar, dalam bahasa Indonesia adalah "sekolah", dengan konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam, sebagai tempat mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainya yang berkembang pada zamanya.[15]

---

[13] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , 2008), 559.
[14] Ibid , 892
[15] Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem : Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; metode;[16]

Pendidikan : Pendidikan: proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang, usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan[17].

Nasional : Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa.[18]

Kebijakan : Kepandaian; kemahiran; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan;[19]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia?
2. Bagaimana integrasi madrasah dalam sistem pendidikan Nasional?
3. Bagaimana tantangan madrasah setelah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional?

D. Tujuan peneliatian

a. Penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia.

---

[16]Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 1362.
[17] Ibid, 263.
[18] Ibid, 997
[19] Ibid, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ingin menganalisis perubahan yang dialami oleh madraha setelah masuk dalam sistem pendidikan nasional.

c. Ingin mengetahui daya saing dan dampak sosial madrasah setelah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis:
   a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Pendidikan Islam terutama berkaitan dengan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional,
   b. Mengkaji madrasah dan posisinya dalam sistem pendidikan nasional
   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bangunan ilmu pengetahuan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam. Khususnya di Jurusan Pendidikan Agama Islam pogram pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat Indonesia umumnya.
2. Secara praktis
   a. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait madarsah dalam sistem pendidikan Nasional.

Hasil rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah dan masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

1. Sejarah perkembangan Madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Indonesia merdeka dan dibentuk Departemen Agama, penyelengaraan madrasah mulai diperhatikan. Walaupun kegiatannya berbentuk pendidikan, tetapi pembinaannya tidak dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu madrasah tidak mendapatkan anggaran belanja dari pemerintah. Apalagi pada umumnya madrasah itu swasta, milik masyarakat. Karena itu variasi madrasah sangat beragam sesuai dengan pola kiai yang mendirikanya. Kurikulum madrasah 100% berisikan tentang ilmu-ilmu agama, walaupun ada ilmu pengetahuan umum, tetapi jumlahnya relatif kecil, tidak sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.[20]

Untuk menanggapi hal tersebut dalam salah satu nota *Islamic Education in Indonesia* yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 september 1956 hal ini digambararkan sebagai berikut: 1). Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. 2). Memberi pengetahuan umum di madrasah. 3). Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

Lembaga agama itu memang berkembang ke arah yang mirip dengan sistem sekolah. Namun ia berbeda karena lebih menekankan pengajaran agama. Sistem pendidikan ini disebut dengan sistem madrasah, karena pengajaran Qur'an dan kitab sudah memakai sistem kelas ini pada umumnya dinamakan dengan madrasah, baik yang sudah ditambahin pelajan umum maupun yang 100% agama.

Sistem madrasah dan pengajaran agama yang diberikan dengan sistem sekolahan termasuk wewenang Departemen Agama. Tujuan utama dari kebijakan Departemen Agama adalah untuk menghapus perbedaan antara sistem sekolah dan

[20] Marwan salahuddin, *Reposisi dan Eksisitensi Madrsah Salafiyah di Era Global*, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah. Departemen Agama tidak begitu campur tangan dalam sistem pesantren dan beberapa untuk pengajian Qur'an. Ia hanya menganjurkan untuk mengadakan modernisasi dan mengambil alih sistem madrasah. Hal ini berarti di satu pihak memberikan kebijaksaan memasukkan sebanyak mungkin pengajaran agama dalam sistem sekolah, sedang di pihak lain berarti memberikan pengetahuan umum dalam sistem madrasah. Melalui cara yang perlahan-lahan kedua sistem pendidikan yang terpisah sejak awal abad 20 ini dapat dipersatukan. Dalam garis besarnya, kebijakan Departemen Agama selalu bertujuan untuk mewujudkan persatuan ini.[21]

Pada masa orde baru terjadi perubahan dimana madrasah sebagai satuan pendidikan keagamaan disamakan dengan sekolah umum setelah adanya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) dengan tujuan meningkatkan mutu madrasah tersebut. Kurikulum madrasah yang berupa pelajaran agama Islam dikurangi, hanya tinggal 30 %, sedangkan mata pelajaran umum, disesuaikan dengan sekolah umum yang setingkat.

SKB 3 Menteri tersebut mengakibatkan perpecahan di kalangan pengelolahan madrasah, sebagian mereka mengikuti pola SKB 3 Menteri tersebut untuk mendapatkan pembinaan intensif dari pemerintah, sebagian madrasah tetap bertahan dengan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, seandanya ada pelajaran umum itupun jumlahnya terbatas tidak sesuai dengan kurikulum nasional, walaupun dengan konskwensi tidak mendapatkan pembinaan dan dan

[21]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah,* 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan dari pemerintah, madrasah seperti ini kemudian dikenal dengan sebutan madrasah diniyah, sebagian lainya disebut madrasah salafiyah.[22]

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh budaya asing karena derasnya arus informasi yang dapat menembus seluruh lapisan masyarakat dan kurangnya pelajaran agama pada sekolahan umum dan mengingat pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang utuh dan memiliki karakter bangsa yang tangguh, maka pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar.

Dalam sejarah sistem pendidikan nasional, madrasah telah mengalami berbagai perkembangan signifikan setelah undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional, yang mengangkat derajat madrasah dari "*second class"* – dalam prespektif banyak orang- menjadi 'sama' atau sederajat dengan sekolah, minimal legal formalistik.

Perkembangan terakhir ini memberikan kontribusi besar dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan secara kultural integrasi madrasah kedalam sistem pendidikan nasional, pada giliranya akan menguatkan bangunan peradaban bangsa ini, karena ini berarti pendidikan bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya.

Masyarakat pada kenyataanya terbelah dalam dua kutub, *pertama* beranggapan bahwa modernisasi madrasah sebagai kooptasi pemerintah atas otoritas masyarakat mengelolah madrasah, dan ujung-ujungnya tidak saja merugikan madrasah bahkan justeru menghilangkan kepentingan umat Islam.

[22] Marwan salahuddin, *Reposisi dan Eksisitensi Madrsah Salafiyah di Era Global*, 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, anggapan bahwa madrasah justeru harus terus 'dimodenisasi' agar tetap *survive* dan mampu menjalin komunikasi secara cerdas dengan tuntutan masa depan. Caranya, madrasah didesain secara terstruktur dengan tidak hanya berkutat pada mata pelajaran agama *an sich*, tetapi juga mendalami mata pelajaran umum dengan baik. Pendidikan madrasah kemudian diyakini memiliki keungulan komporatif karena diyakini mampu mengantarkan siswa pada ranah yang lebih komprehensif, meliputi aspek intelektual, moral spiritual dan keahlian ilmu modern sekaligus.[23]

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 madrasah mempunyai kedudukan dan pengakuan yang jelas dan tegas tentang posisi madrasah dinyatakan dalam Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, yaitu : Pasal 17 ayat 2 " Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsnawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 yaitu "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejurusan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejurusan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pergulatan madrasah untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional bukanlah hal yang mudah. Padahal madrasah telah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan madrasah mulai mendapatkan hasil yang mengembirakan ketika ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional sebab turun dari UU tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1990 yang pada

[23] Nuruddin, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Peneliti*, Dialog Vol. 37, No 1 juni 2014. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III pasal 4 ayat 3 dinyatakan “sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah”. Selain itu, dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/V/1992 tentang sekolah menengah Umum dalam Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Dengan pengakuan tersebut, Madrasah harus melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolah-sekolah umum yang ada dalam naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, disamping itu pula melaksanakan pendidikan Islam yang menjadi ciri khas pendidikan di madrasah yang ditetapkan dalam kurikulum Kementrian Agama.[24]

2. Integrasi Madrasah dalam sistem pendidikan nasional

Integrasi berasal dari bahasa inggris *"integration"* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

[24] Ibid, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan.

Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya.[25]

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam masyarakat selalu terdiri atas unsur-unsur yang satu dan lainya terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan kedudukan sosial, suku, ras, agama, bahasa dan kebudayaan. Agar perbedaan tersebut dapat hidup berdampingan, maka perlu untuk menyelaraskan berbagai perbedaan tersebut agar dapat tercapai kesatuan kehidupan dalam suatu wadah baik dalam hubunganya dengan asosiasi sosial atau asosiasi yang lebih besar yang diesbut Negara. Pembangunnan yang dilaksanakan dalam suatu negara memerlukan suatu yang integratif di dalam sebab disentegrasi menimbulkan berbagai masalah sosial.[26]

Maka dalam integrasi madrasah dalam sistem nasional adalah madrasah menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional dan status madrasah sudah menjadi legal formal.

G. Penelitian Terdahulu

Ahid, Nur, Desertasi, 2008, institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, “Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia (Telaah Segi Institusi dan Kurikulum”.

---

[25] http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial diakses tanggal 3 Desember 2014.

[26] Elly M. Setiada dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Permasalahan Gejala Sosial-Teori, Aplikasi dan Pemecahanya,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fokus penelitian dalam desertasi ini problem apa saja yang terjadi pada Madrasah Aliyah di Indonesia, baik segi institusi mapun kurikulum, apa saja yang melatar belakangi problem tersebut, apa akibatnya dan bagaimana solusianya. Dalam desertasi tersebut menjelaskan problem dalam Madrasah Aliyah di Indonesia yaitu kurangnya guru, tidak jelasnya status guru, tidak layaknya kualifikasi guru. Dan untuk Madrasah Aliyah Program Khusus tidak adanya payung hukum. Dalam desertasi ini mengunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-analisis. Untuk mengumpulkan datanya mengunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan logika berfikir induktif dan content analisis.

Zahidi, Salman, Tesis, 2013, Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, "Pengembangan Komite Madrasah dalam Penyelengaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Gresik."

Tesis ini menjelaskan tentang Madrasah dalam penyelengaraan di madrasah Tsanawiyah Kabupaten Gresik tentang eksisntensi komite madrasah dalam penyelengaraan pendidikan di madrasah dalam menyelengarakan pendidikan di madrasah kabupaten Gresik , peran madrasah , dan bagaimana pemberdayaan komite madrasah.

Perbedaan tesis penulis dengan kedua penelitian tersebut terletak pada permasalahan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dalam penelitian ini penulisa menganalisa sejarah madrasah dalam pendidikan Indonesia, menganalisis kebijakan-kebijakan madrasah dalam pendidikan Indonesia serta dampak dari kebijakan tersebut dilihat dari sosial maupun daya saing madrasah dengan sekolah-sekolah lain yang berada di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) atau bisa disebut sebagai *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini mengunakan *context analisis* (penelitian isi) penelitian ini merupakan melakukan analisis tekstual, penelitian ini merupakan merduksi teks menjadi unit-unit dan kemudian merepapkan skema pengodean pada unit-unit tersebut untuk membuat inferensi komunikasi terhadap teks.[27]Dalam pembahasan ini juga menggunakan metode sejarah, Moch Nazir mengutip pendapatnya Nevins (1933) Sejarah adalah pengetahuan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi, sejarah adalah deskriptif yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi kritis untuk mencari kebenaran. Penelitian dengan mengunakan metode sejarah penyelidikan yang kritis terhadap kedadan-keaadaan, perkembangan, serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

Adapun cirri-ciri metode sejarah sebagai berikut:

a. Metode sejarah lebih banyak mengantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa-masa lampau.

[27] Richard west dan Lynn H Tunner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang digunakan lebih banyak tergantung pada data primer dari pada data sekunder.

c. Metode sejarah mencarai data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun yang tidak dikutip dalam bahan acuan yang standar.

d. Sumber data harus dinyatakan secara definitive, baik nama pengarang, tempat dan waktu.[28]

Berkaitan dengan judul tesis ini integritas madrasah dalam sistem pendidikan nasional analisis kebijakan madrasah dalam sistem pendidikan nasional era kemerdekaan sampai pasca reformasi maka yang diteliti adalah posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional mulai dari sejarah madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia dan kebijakan-kebijakan madrasah dalam sistem pendidikan nasional .

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau literer, maka penelitian in menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif[29] analitis, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif.

3. Sumber yang Digunakan

a. Sumber Primer

- Undang-Undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3

[28] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 54.

[29] Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional sebab turun dari UU tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1990 yang pada Bab III pasal 4 ayat 3.
- UU No 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20.
- Pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966.

b. Sumber Skunde

- Data-data yang bersangkutan dengan posisi madsrasah dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari buku-buku, artikel, jurnal webset direkrat madrasah dan sumber-sumber yang lainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam tesis ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen.[30] Penulis merujuk sumber primer baik sumber tersebut yang terdapat langsung dalam sistem pendidikan nasional serta sejarah madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia maupun sumber-sumber sekunder terkait kajian orang lain yang membahas tentang sejarah madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia serta posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Disamping dokumenter teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode:

a) *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.

b) *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

[30] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2010), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

d) Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif yang bermaksud mengorganisasikan data. Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[31]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara induktif[32]. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi (penyimpulan) berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan untuk dikelompok-kelompokkan. Jadi penyusunan teori beranjak dari bawah ke atas, dari sejumlah bagian-bagian yang banyak dikumpulkan, kemudian disistematisasikan dalam satu kesatuan yang saling berhubungan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, atau teori yang telah ada, melainkan dikembangkan dari data di lapangan (induktif).

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama* mengugkapakan sejarah madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia, mulai dari abad ke 20 sampai sampai pada pasca reformasi. *Kedua* memaparkan kebijakan-kebijakan madrasah mulai dari masa kemerdekaan sampai pasca reformasi serta menganalisis latar belakang terbentuknya kebijakan-kebijakan tersebut sampai

[31] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 193.
[32] Salah satu karakteristik penelitian kualitatif yang dijelaskan Moeloeng adalah analisis data secara induktif. Lihat Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada madrasah terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. *Ketiga* menganalisis daya saing dan dampak sosial madrasah setelah terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. *Keempat* memaparkan pendapat para tokoh-tokoh pendidikan terkait pro kontra madrasah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. *Kelima* menarik kesimpulan dari temuan data-data tersebut.

I. Sistematika Pmbahasan

Sistematika penulisan dalam tesis ini sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan dalam bab ini disajikan latar belakang, alasan memilih judul, kegunaan penelitian, rumusan masalah, jenis penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kajian teori dalam bab ini disajikan sejarah madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia, kebijakan-kebijakan madrasah dalam pendidikan Indonesia, daya saing dan dampak sosial madrasah setelah terintegrasi dengan sisitem pendidikan nasional.

Bab III berisikan metodelogi penelitian, dalam bab ini disajikan tentang metode penelitian sejarah, analisis kebijakan dan kerangka penelitian.

Bab IV berisikan hasil penelitian dalam bab ini analisis Madrasah dalam pendidikan Islam Indonesia, analisis kebijakan-kebijakan pemerintah tentang madrasah dalam sistem pendidikan nasional mulai dari masa pasca kemerdekaan atau orde lama, orde baru dan pasca kemerdekaan. Analisis tantangan madrasah setelah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

BAB V berisi penutup yakni kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id